BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Gerakan Separatis RMS (Republik Maluku Selatan)

Berbagai pandangan tentang penyebab munculnya separatisme telah lama diketahui, dan para pengambil kebijakanpun sudah merumuskannya, dalam langkah-langkah aturan dan peraturan. Saparatisme di Negara kita muncul karena berbagai faktor, seperti faktor ideologi, ketidak adilan, kesejahteraan, kebijakan politik, penggunaan kekerasan yang melanggar HAM, dan berbagai hal lainnya yang kurang lebih sama. Secara teoritis, separatisme subur di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan, pembangunan terbengkalai, kaya akan sumber daya alam, dan kuatnya perasaan perbedaan etnis dengan etnis yang berkuasa. Pandangan diatas dapat digunakan untuk menggambarkan gerakan separatis RMS, RMS merupakan suatu gerakan separatis dengan tujuan memisahkan diri dari NKRI. Pasca diproklamasikannya kemerdekaan RMS, para aktivis RMS pun melarikan diri ke negara kincir angin Belanda akibat operasi penumpasan yang dilakukan oleh Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) (Julius Pour 2008 : 5).

Pasca ditumpas oleh pasukan APRIS dan mengasingkan diri di Belanda, RMS pun seakan tenggelam. Gerakan separatis itu dihidupkan kembali setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998, terutama oleh tokoh-tokoh warga keturunan Maluku di Belanda. Eksisnya RMS di Belanda memberi angin segar bagi bangkitnya lagi harapan pada sebagian kecil rakyat Maluku.

Dari perjalanan panjang dan sepak terjang RMS dapat dikatakan sangat berbahaya karena jelas-jelas ingin mendirikan satu negara di dalam negara Indonesia. Jelasnya RMS tetap ada, tetap eksis dan berani melawan pemerintah Indonesia secara terbuka dimata internasional. Banyak latar belakang di balik tumbuhnya kembali gerakan separatis RMS. "Agar RMS tidak ada lagi, dan RMS tidak mendapat dukungan dari masyarakat Maluku lainnya ialah berikan keadilan, pemerataan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Selain itu pola kekerasan yang dilakukan terhadap orang RMS harus dihilangkan,"

3.1.1 Sejarah Terbentuknya Gerakan Separatis RMS

Tanggal 24 April 1950, mantan jaksa Agung Negara Indonesia Timur (NIT), Dr C.R.S. Soumokil bersama rekan-reknanya memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan, terpisah dari Republik Indonesia dan menetapkan Kota Ambon sebagai pusat pemerintah mereka. Proklamasi RMS tersebut didukung oleh sisa-sisa pasukan KNIL (*Koninklijke Nederlands Indische Leger)*, terutama bekas pasukan khusus KST *(Korps Speciale Troepen)* yang secara tegas menyatakan menolak untuk bergabung dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) sekaligus menolak perintah untuk melalukan demobilisasi (Julius Pour, 2008 : 3)

Adapun faktor-faktor Kemunculannya RMS diantaranya pada masa penjajahan pemerintahan Belanda, masyarakat Maluku telah banyak diberikan fasilitas pendidikan dan menarik masyarakat Ambon yang beragama Kristen untuk menjadi bagian dalam pemerintahannya, terutama ke dalam birokrasi dan tentara. Jika dibandingkan dengan pemerintah Indonesia yang pada saat itu hanya memusatkan perhatian pada daerah-daerah tertentu saja (sentralistik). Sehingga membuat masayarakat Ambon Maluku lebih makmur dibawah kepemimpinan Belanda dan berkaitan dengan orang-orang pro Belanda yang merasa terancam kedudukan jika Indonesia benar-benar merdeka (T May Rudy 2003 : 87)

Ketika pada 1945, Belanda kembali menguasai Ambon, langsung dibangun dengan pembangunan rumah-rumah, pertokoan dan gedung-gedung perkantoran hingga Ambon ini mulai berbentuk sebagai kota. Kota yang sempat botak, karena pada masa peperangan pohon-pohon kenari di tebang untuk digunakan sebagai kayu bakar. Hasilnya menjelang penyerahan kedaulatan kehidupan Ambon sudah menjadi lebih baik, dan kota Ambon mulai menjadi indah dan kehidupan menjadi tenang, lantaran kegiatan ekonomi sudah membaik. Bahkan lebih baik di banding dengan kota-kota besar di Indonesia, terutama Jawa dan Sumatera yang hancur sebagai akibat dari revolusi. Sementara Ambon tidak pernah mengalami revolusi sosial ataupun revolusi fisik setelah pasca Perang Dunia II

Berdirinya RMS di Republik ini tentu mempunyai latar belakang dan fakta sejarah yang cukup panjang. Dua hari menjelang kemerdekaan, kebangkitan nasionalisme hampir menyentuh seluruh Indonesia. Hal itu bisa dibuktikan dalam karya Ir J A Manusama dalam bukunya Om Recht en Vrijheid (Memperjuangkan Kemerdekaan. Dia menulis: “Ketika terjadi kapitulasi oleh Jepang pada 15 Agustus 1945, kebangkitan kemerdekaan hampir di seluruh Indonesia tumbuh. sementara masyarakat Maluku Selatan bersikap apatis dan tidak perduli satu dengan yang lainnya.
Hal ini dapat terjadi karena selama ini masyarakat Maluku Selatan terkucil dan tidak pernah tersentuh oleh pengenalan nasionalisme dengan kaum nasionalis dari Maluku yang berada di Jawa yang tak pernah berhubungan sejak sebelum Perang Dunia II.

Dari perjalanan panjang dan sepak terjang RMS dapat dikatakan sangat berbahaya karena jelas-jelas ingin mendirikan satu negara di dalam negara Indonesia. Jelasnya RMS tetap ada, tetap eksis dan berani melawan pemerintah Indonesia secara terbuka dimata internasional. Dalam pandangan Ernst Utrecht dalam bukunya, berpendapat: “Berbicara mengenai dunia politik, pada umumnya masih asing bagi masyarakat Maluku dan belum membudaya. Orang Ambon baru sibuk bilamana ia sendiri, keluarganya atau teman-

temannya terancam, dan bersikap spontan tanpa memahami permasalahannya dahulu dalam mengambil keputusan. Sikap dan pembawaan ini hingga ia mudah menjadi korban politik praktis. Padahal mereka sangat setia dan dalam unsur-unsur keagamaan, rajin kerja di kantor, dan pembawaannya dalam pergaulan sangat ceria dengan siapapun yang disenanginya."

3.1.2 Tujuan Gerakan Separatis RMS

Gerakan ada karena adanya tuntutan, mungkin itu jawaban dari maraknya bermunculan gerakan separatis di Indonesia salah satunya RMS. Tipuan desentralisasi pemerintah membuat banyak kecewa setiap individu di daerah tertinggal. Merasa dianak-tirikan akhirnya membuat mereka geram. Pembangunan merata jauh dari kenyataan. Separatisme selalu dipahami sebagai gerakan yang bersifat politis untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain (atau suatu negara lain). Itu sebabnya separatisme di Indonesia selalu bertujuan serupa, memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Disamping itu, tak dapat dipungkiri, bahwa salah satu akar penyebab munculnya gerakan separatis di Indonesia seperti GAM di Aceh, RMS di Maluku dan OPM di Papua lebih disebabkan oleh ketidakadilan ekonomi yang dirasakan oleh rakyat di wilayah-wilayah tersebut. Aceh dan Papua dikenal sebagai daerah yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah tapi penduduk di sana miskin. Karena itu, upaya menciptakan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat menjadi sangat penting. Gerakan separatis biasanya berbasis nasionalisme atau kekuatan religius. Selain itu, separatisme juga bisa terjadi karena perasaan kurangnya kekuatan politis dan ekonomi suatu kelompok. Iniliah yang dijadikan dasar bagi gerakan separtis RMS untuk

memenuhi tujuannya yaitu mendapakan kedaulatan dan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

3.1.3 Struktur Gerakan Separatis RMS

Seperti halnya sebuah negara dan pemerintahan gerakan separatis RMS juga mempunyai struktur kepemimpinan baik pemerintahan yang berada di Belanda maupun di Maluku :

1. Pemerintahan RMS di Belanda

   J.Wattilete Presiden Republik Maluku Selatan (RMS)

   Pemerintah darurat RMS terdiri atas kepala negara dan menteri-menteri. Kepala negara mengetuai dewan kementerian lagipun memegang Soal Umum.

   Pada saat ini menteri-menteri yang telah diangkat:

   Trientje Magdalena Solisa sebagai menteri Penerangan dan Pembentukan

   Drs. Willem Victor Sopacua sebagai wakil kepala negara dan menteri Maluku dan Nationbuilding

   Ir. Edy Rahantoknam sebagai menteri Perkembangan dan Kerjasama

2. Pemerintah RMS di Maluku

   Dr. Alex Manuputty sebagai Pemimpin dan Koordinator

   Simon Saiya sebagai penyelenggara eksekutif pimpinan pemerintahan RMS di Maluku

   Frans Sanmiasa Menteri Dalam Negerinya merangkap wakil penyelenggara pemerintahan.

   Markus Anakotta menjabat sebagai sekretaris dan dilengkapi dengan tiga orang pengendali lapangan serta lima orang pelaksana lapangan (Sumber : http://wwwrepublik-maluku-selatan.nl/ Diakses pada tanggal 8 April 2011).

3.2 Gambaran Umum Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Kebijakan Luar Negeri Indonesia merupakan pengejawantahan dari tujuan nasional Indonesia yakni memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia sebagaimana yang diamatkan pada Pembukaan UUD 1945. Dalam melaksanakan kebijakan luar negeri Indonesia tersebut, Indonesia menghadapi lingkungan yang berubah, baik di tataran nasional, regional maupun internasional. Perubahan tersebut membawa serta sejumlah tantangan yang semakin besar dan kompleks, oleh karena itu langkah-langkah yang nyata diperlukan untuk menyikapinya.

Perubahan-perubahan tersebut antara lain mengakibatkan aktor dalam hubungan antara bangsa juga semakin beragam dan tingkat keterlibatan mereka tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena itu kegiatan diplomasi tidak mungkin diemban secara sendirian oleh kementrian luar negeri. Dukungan publik serta media massa nasional maupun internasional mempeunyai yang sangat besar dan penting dalam upaya meningkatkan kepentingan nasional Indonesia.

3.2.1 Landasan Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Seperti yang telah kita ketahui, landasan konstitusional Indonesia adalah UUD 1945. Pasal-pasal UUD 1945 mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memberikan garis-garis besar serta landasan dalam kebijakan luar negeri Indonesia yang diatur dalam :

a. Pancasila sebagai Landasan Ideal

   Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia.

b. Landasan Konstitusional

Landasan konstitusional kebijakan luar negeri Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke empat.

Politik luar negeri adalah arah kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungannya dengan negara lain. Politik luar negeri merupakan bagian dari kebijakan nasional yang diabdikan bagi kepentingan nasional dalam lingkup dunia internasional. Setiap negara mempunyai kebijakan politik luar negeri yang berbedabeda. Karena politik luar negeri suatu negara tergantung pada tujuan nasional yang akan dicapai. Kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh faktor luar negeri dan faktor dalam negeri.

a. Faktor Luar Negeri

Faktor luar negeri, misalnya akibat globalisasi. Dengan globalisasi seakanakan dunia ini sangat kecil dan begitu dekat. Maksudnya dunia ini seperti tidak ada batasnya. Hubungan satu negara dengan negara lainnya sangat mudah dan cepat. Apalagi dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi seperti sekarang ini. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di negara lain dengan mudah diketahui oleh negara lain.

b. Faktor Dalam Negeri

Faktor dalam negeri juga akan mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Misalnya sering terjadinya pergantian pemimpin pemerintahan. Setiap pemimpin pemerintahan mempunyai kebijakan sendiri terhadap politik luar negeri.

3.3 Tujuan Umum Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Tujuan umum kebijakan luar negeri setiap negara adalah mengabdi kepada tujuan nasional negara itu sendiri. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat yang menyatakan ”… melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial …” Menurut Drs. Moh. Hatta, tujuan kebijakan luar negeri Indonesia, antara lain sebagai berikut: memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat, meningkatkan perdamaian internasional, meningkatkan persaudaraan dengan semua bangsa.

Kebijakan luar negeri tidak terlepas dari hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri merupakan hubungan antarbangsa, baik regional maupun internasional, melalui kerja sama bilateral ataupun multirateral yang ditujukan untuk kepentingan nasional. Politik luar negeri Indonesia oleh pemerintah dirumuskan dalam kebijakan luar negeri yang diarahkan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional. Kebijakan luar negeri oleh pemerintah dilaksanakan dengan kegiatan diplomasi yang dilaksakan oleh para diplomat. Dalam menjalankan tugasnya para diplomat dikoordinasikan oleh Departemen Luar Negeri yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri. Tugas diplomat adalah menjembatani kepentingan nasional negaranya dengan dunia internasional.

3.4 Kebijakan Indonesia Terhadap Gerakan Separatis RMS

Pada tahun 1950, Dr. Chris Soumukil memproklamirkan berdirinya Republik Maluku Selatan (RMS). RMS kemudian menjadi momok separatis Indonesia. Kemunculannya sebenarnya berkaitan dengan orang-orang pro Belanda yang merasa terancam kedudukan jika

Indonesia benar-benar merdeka. Kebijakan Indonesia pun telah ditujukan tehadap RMS pasca proklamasi kemerdekaan RMSpemerintah Indonesia Pemerintah Pusat yang mencoba menyelesaikan secara damai, mengirim tim yang diketuai Dr. J.Leimena sebagai misi perdamaian ke Ambon. Tapi kemudian, misi yang terdiri dari para politikus, pendeta, dokter dan wartawan, gagal dan pemerintah pusat memutuskan untuk menumpas RMS, lewat kekuatan senjata. Dibentuklah pasukan di bawah pimpinan Kolonel A.E. Kaliwarang. Pada 14 Juli 1950 Pasukan ekspedisi APRIS/TNI mulai menumpas pos-pos penting RMS. Sementara, RMS yang memusatkan kekuatannya di Pulau Seram dan Ambon, juga menguasai perairan laut Maluku Tengah, memblokade dan menghancurkan kapal-kapal pemerintah. Pemberontakan ini berhasil digagalkan secara tuntas pada bulan November 1950, sementara para pemimpin RMS mengasingkan diri ke Belanda. Pada 1951 sekitar 4.000 orang Maluku Selatan, tentara KNIL beserta keluarganya (jumlah keseluruhannya sekitar 12.500 orang), mengungsi ke Belanda.

Setelah lama tenggelam dalam perjuangannya RMS kembali melakukan aksi penentangan terhadap pemerintah RI dengan melaporkan presiden RI SBY, atas tuduhan pelanggaran HAM di pengadilan Den Haag Belanda, Tujuan dari kegiatan aktivis RMS tiada lain untuk menarik perhatian pemerintah, dan memancing-mancing reaksi keras dari pemerintah, sekaligus guna menunjukkan eksistensi mereka di dalam negeri yang terus dipantau dan mendapat suplai dukungan dari RMS di Belanda untuk menginternasionalisasikan isu RMS di Maluku, untuk itu pemerintah RI melalui Departemen Luar Negeri mengeluarkan kebijakan terkait dengan perlakuan RMS ini. Pertama, meminta kepada pemerintah Belanda untuk menjadi mediator dalam penyelesaian masalah antara Pemerintah Indonesia dengan gerakan RMS untuk melakukan perundingan dan kembalinya RMS ke pangkuan Republik Indonesia. Seperti yang telah dilakukan oleh Indonesia dengan GAM. Kedua, Pemerintah Indonesia harus lebih tegas kepada Belanda sehubungan dengan

dukungan pemerintah Belanda yang sekarang terhadap keberadaan RMS. Sebab RMS merupakan organisasi pemberontakkan yang melarikan diri ke Belanda. Hal ini perlu untuk dipertanyakan karena pemerintah Belanda masa lalu sangat jelas pembelaannya terhadap RMS.

3.5 Gambaran Umum Kebijakan Luar Negeri Belanda

Kebijakan luar negeri dari Belanda didasarkan pada empat komitmen dasar: untuk kerjasama atlantic, untuk integrasi Eropa, untuk pembangunan internasional dan hukum internasional. Sementara historis Belanda adalah negara netral, sejak Perang Dunia II Belanda menjadi anggota dari sejumlah besar organisasi internasional. Perang Dunia Kedua, mengakibatkan ikatan sejarah warisan dari masa kolonial masih mempengaruhi hubungan luar negeri dari Belanda.

Sebagai bagian dari komitmennya untuk Uni Eropa, Belanda juga telah berjanji sendiri untuk proses integrasi moneter Eropa, termasuk penerapan Euro sebagai mata uang resmi pada tahun 2002. Pada akhir 1990-an, Belanda menjadi lebih tegas tentang sumbangan kepada Uni Eropa setelah itu telah menjadi penyumbang terbesar kedua. Selain keanggotaannya di Uni Eropa, Belanda juga merupakan mitra dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan Uni Eropa Barat. Ini adalah melalui NATO dan PBB bahwa Belanda secara historis berpartisipasi dalam operasi penjaga perdamaian banyak, termasuk yang dikirim ke Yugoslavia. Belanda adalah salah satu penyedia bantuan asing di dunia yang paling dermawan.

3.5.1 Landasan Kebijakan Luar Negeri Belanda

Kebijakan luar negeri Belanda berlandaskan pada empat komitmen dasar : yaitu pertama, untuk kerjasama atlantik , kedua, untuk integrasi Eropa , ketiga, untuk

pembangunan internasional dan keempat, berlandaskan hukum internasional. Sementara historis Belanda adalah negara netral, sejak Perang Dunia II Belanda menjadi anggota dari sejumlah besar organisasi internasional. Perekonomian Belanda sangat terbuka dan bergantung pada perdagangan internasional.

Prioritas dari Kebijakan Luar Negeri Belanda yaitu integarasi Uni Eropa serta memelihara hubungannya dengan negara tetangga yang tergabung dalam organisasi Uni Eropa. Belanda juga ikut serta menjaga stabilitas keamanan Eropa dan berpartisipasi dalam pengelolaan konflik dan misi perdamaian.

Kebijakan luar negeri Belanda bertujuan untuk menjamin kepentingan Belanda dan terinspirasi oleh keinginan untuk mempromosikan perdamaian, kebebasan, kesejahteraan dan tatanan hukum internasional. Kerjasama pembangunan merupakan bagian penting dari kebijakan luar negeri. Belanda mengejar kebijakan luar negerinya terutama dalam kerangka organisasi multilateral, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa (UE) dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Ia mengambil bagian secara teratur dalam operasi perdamaian dari organisasi. Belanda juga berusaha untuk mempertahankan hubungan bilateral yang baik dengan negara-negara di dunia (Sumber : http://www.bz.minbuza.nl/ diakses pada tanggal 6 April 2011).

3.6 Tujuan Umum Kebijakan Luar Negeri Belanda

Departemen Luar Negeri adalah saluran komunikasi Pemerintah Belanda dengan pemerintah asing dan organisasi internasional untuk koordinasi dan pengiriman kebijakan luar negeri Belanda. Tujuan dari kebijakan luar negeri Belanda ada tiga: yang pertama yaitu mempromosikan hubungan baik antara Kerajaan Belanda dan negara-negara lain, kedua, untuk melindungi negara terhadap ancaman luar, dan ketiga, untuk mempromosikan sebuah

dunia yang adil di mana perdamaian, keamanan, kesejahteraan, dan martabat manusia dijamin.

Belanda meninggalkan kebijakan lama netralitas setelah Perang Dunia II. Belanda terlibat serta dalam urusan internasional. kebijakan luar negeri Belanda diarahkan untuk mempromosikan berbagai tujuan: aturan hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Prioritas diberikan untuk meningkatkan integrasi Eropa, menjamin keamanan dan stabilitas Eropa (terutama melalui mekanisme NATO dan dengan menekankan peran penting Amerika Serikat yang bermain dalam keamanan Eropa), dan berpartisipasi dalam pengelolaan konflik dan misi perdamaian.

Kebijakan luar negeri Belanda bertujuan untuk menjamin kepentingan Belanda dan terinspirasi oleh keinginan untuk mempromosikan perdamaian, kebebasan, kesejahteraan dan tatanan hukum internasional. Kerjasama pembangunan merupakan bagian penting dari kebijakan luar negeri. Belanda mengejar kebijakan luar negerinya terutama dalam kerangka organisasi multilateral, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa (UE) dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Ia mengambil bagian secara teratur dalam operasi perdamaian dari organisasi. Belanda juga berusaha untuk mempertahankan hubungan bilateral yang baik dengan negara-negara tetangganya, Perancis, Jerman dan Inggris, negara-negara Skandinavia, mitra Benelux Belgia dan Luksemburg, dan negara-negara yang tergabung dalam integrasi Uni Eropa lainnya serta negara-negara anggota NATO. Selain itu, Belanda memiliki ikatan yang kuat dengan Amerika Serikat dan membantu negara-negara Eropa Tengah dan Timur membuat transisi ke demokrasi dan ekonomi pasar.

Belanda adalah anggota pendiri PBB, NATO, Masyarakat Eropa (sekarang Uni Eropa), Dana Moneter Internasional, Bank Dunia dan Uni Eropa Barat. Sebagai negara yang relatif kecil dengan ekonomi global yang berorientasi, Belanda menempel sangat penting bagi suatu tatanan dunia yang terstruktur baik.

Belanda adalah anggota dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), aliansi militer yang terdiri dari Amerika Serikat, Kanada dan banyak negara Eropa. NATO, landasan kebijakan keamanan Belanda, telah bekerja untuk perdamaian, keamanan dan stabilitas sejak tahun 1949. Sejak akhir Perang Dingin, NATO telah disesuaikan dengan perubahan hubungan internasional dengan menyimpulkan perjanjian kemitraan dengan negara-negara di Eropa tengah dan timur, Mediterania dan Timur Tengah. NATO juga bekerjasama lebih erat dengan Rusia di Dewan NATO-Rusia, yang didirikan pada tahun 2002, dan memiliki hubungan khusus dengan Ukraina melalui Komisi NATO-Ukraina.

Kebijakan luar negeri Belanda terutama berfokus pada Uni Eropa (EU), North Atlantic Treaty Organisation (NATO) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tujuan utama dari kebijakan, yaitu kerja sama pembangunan merupakan bagian integral, adalah mempromosikan perdamaian, kebebasan dan kemakmuran seluruh dunia. Uni Eropa adalah penting untuk Eropa dan Belanda. Untuk Eropa itu berarti mempromosikan perdamaian, stabilitas keamanan dan kemakmuran. Untuk Belanda pentingnya terletak pada kenyataan bahwa kerjasama dan kebijakan umum di Uni Eropa menjadi kondisi dasar untuk kemudi yang memadai dan menyelesaikan isu-isu internal dalam peningkatan jumlah daerah. Masa depan Belanda terjalin dengan Uni Eropa (Sumber : http://www.minbuza.nl / inggris/ diakses pada tanggal 6 April 2011).

3.7 Hubungan Luar Negeri Indonesia – Belanda

Sejak Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, hubungan dengan pemerintah Kerajaan Belanda selalu mengalami pasang surut. Hubungan Indonesia dan Belanda terjalin sangat baik justru terjadi pada era Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Hubungan bilateral Indonesia-Belanda memang sering diganggu oleh aksi-aksi RMS. Juga oleh problem psikologis masa lalu, di mana Belanda pernah menjajah Indonesia. Namun, Indonesia-

Belanda telah lama berupaya mempererat hubungan dengan menyamakan cara pandang. Hal ini antara lain ditandai dengan kehadiran Menteri Luar Negeri Belanda Bernard Bot pada perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2005 silam.

Bernard Bot juga telah menyampaikan pengakuan secara de facto atas kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pengakuan tersebut akan diperkuat oleh dokumen tertulis yang bakal ditandatangi Indonesia dan Belanda tentang pengakuan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Ini akan menyudahi berpuluh tahun pengingkaran Belanda yang hanya mengakui penyerahan kedaulatan kepada Indonesia di Istana Dam, Amsterdam, pada 27 Desember 1949 setelah pelaksanaan Konferensi Meja Bundar. Pengakuan yang diharapkan menghilangkan beban sejarah itu pun akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjiaan kemitraan komprehensif antara Indonesia dan Belanda agar kedua negara semakin mempererat dan memperluas kerjasama di masa depan. Yang signifikan adalah penandatanganan perjanjian komprehensif. Karena kedua negara ini bisa melihat ke depan, tidak lagi terseret-seret oleh beban sejarah dan menunjukkan kedewasaan hubungan kedua negara, Perjanjian kemitraan komprehensif itu pun telah melalui masa persiapan cukup lama sejak disepakati pada 13 Juni 2006 oleh menteri luar negeri kedua negara saat itu, Hassan Wirajuda dari Indonesia dan Bernard Bot dari Belanda. Saat itu kedua menteri saling mengunjungi dan bertatap muka secara intensif guna menyusun hubungan kedua negara yang berbagi sejarah cukup panjang di belakang, namun ingin melongok jauh ke depan. Perjanjian kemitraan intensif bertujuan mengembangkan dan memperdalam berbagai aspek hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda yang meliputi segala bidang, mulai politik dan keamanan, ekonomi, hingga sosial budaya.

Di bidang ekonomi, Indonesia dan Belanda selama periode 2004-2008 berhasil menaikkan volume perdagangan sebesar 17,38 persen meskipun sempat menyusut akibat krisis keuangan global dari 4,142 miliar dolar AS pada 2008 menjadi 3,405 miliar pada 2009.

Pada 2008, Belanda merupakan investor asing terbesar keempat di Indonesia setelah Inggris, Jerman,dan Perancis dengan nilai 89,9 juta dolar AS yang meliputi 34 proyek. Dalam pertemuan Komisi Bersama Kerjasama Ekonomi Bilateral Indonesia-Belanda yang digelar pada Maret 2010, kedua pihak sepakat mengatasi hambatan kerjasama perdagangan dan investasi, khususnya peraturan yang diterapkan terhadap komoditi Indonesia ke Belanda dan Uni Eropa serta mengatasi hambatan investasi Belanda di Indonesia.

Dibukanya kembali rute penerbangan Garuda Indonesia Jakarta-Amsterdam sejak 2010 diharapkan memperlancar hubungan ekonomi kedua negara, sekaligus meningkatkan potensi pariwisata. Kemudian kerjasama di bidang pendidikan, kerjasama tersebut melengkapi kemitraan Indonesia dan Belanda yang sangat intensif di bidang pendidikan. Belanda memusatkan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya adalah di bidang pendidikan dengan menyediakan dana sebesar 30,8 juta Euro untuk beasiswa pendidikan tinggi pada periode 2006-2011. dengan cara itu, negeri kincir angin tersebut menjadi salah satu tujuan utama mahasiswa Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri. Bantuan itu masih ditambah dengan dana yang disalurkan Belanda melalui Bank Dunia guna memperbaiki pendidikan dasar dan meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang pada 2006 saja nilainya masing-masing 24 juta Euro dan 22 juta Euro.